

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia saat ini telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan di daerahnya melalui otonomi daerah. Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai aspirasi masyarakat berdasarkan perundang-undangan. Salah satu wewenang tersebut adalah dalam hal keuangan daerah dimana menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004, keuangan daerah adalah kewenangan dan kemampuan daerah dalam menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung dengan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah serta dari Provinsi ke Kabupaten/Kotamadya yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah. Kemampuan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi tolak ukur kemandirian daerah.

Kemandirian suatu daerah dapat diwujudkan apabila pemerintah daerah dapat menggali potensi-potensi yang ada di daerah sebagai sumber pendapatan dan pembiayaan dalam melakukan pembangunan di daerahnya. Diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan

desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan, yang salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain yang sah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dengan cara menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber PAD. Dengan adanya PAD yang besar, menunjukkan bahwa masyarakat di daerah tersebut memiliki partisipasi yang besar dalam menanggung biaya pembangunan dan pemerintahan.



Sumber : Djpk, Kemenkeu(diolah) 2022

Gambar 1.1

Komposisi Pendapatan Daerah Nasional Tahun Anggaran 2020

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa komposisi dana perimbangan memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota se Indonesia yaitu

sebesar 66% atau Rp. 815.561,95 miliar, PAD 26% atau Rp. 328.418,72 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 8% atau Rp. 95.770,38 miliar. Dengan demikian, ketergantungan daerah Kabupaten/Kota pada dana perimbangan masih dominan, karena peran PAD masih relatif kecil dalam menyumbang pendapatan daerah Kabupaten/Kota. Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, pemerintah perlu menggali sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan pendapatan asli daerah yang besar, salah satunya melalui sektor pariwisata.

Sektor pariwisata sebagai kegiatan perekonomian telah menjadi andalan potensial dan prioritas pengembangan bagi sejumlah negara. Sektor ini memegang peranan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan di Asia Pasifik. Pada abad 21 saat ini, pertumbuhan pariwisata sudah berkembang menjadi suatu industri terbesar dan menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan paling pesat dalam perekonomian dan jasa-jasa. Industri pariwisata merupakan jenis industri yang mempunyai mata rantai kegiatan yang sangat panjang yang tujuannya adalah mengarahkan dan mengembangkan nilai-nilai ekonomi yang disebabkan adanya lalu lintas orang-orang yang mengadakan perjalanan untuk tujuan pariwisata. Sektor pariwisata memberikan kontribusi dalam pendapatan negara, oleh karena itu pemerintah berusaha memperbaiki dan mengelola potensi pariwisata yang ada di Indonesia untuk menarik wisatawan mancanegara ataupun domestik dengan harapan memperoleh lebih banyak pemasukan nilai devisa. Terlebih bagi Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi dimana setiap provinsi memiliki potensi wisata yang cukup tinggi, maka potensi

pariwisata harus dikembangkan sebagai program utama dalam meningkatkan pendapatan negara.

Potensi pariwisata di Indonesia sangatlah besar, membentang dari Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sampai Provinsi Papua dengan segala keanekaragaman objek pariwisata. Berdasarkan data dari BPS, beberapa Provinsi di Indonesia yang paling sering dikunjungi wisatawan menurut BPS yaitu Bali, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, DIY, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Lombok (NTT).

Tabel 1.1
Daerah Yang Paling Banyak Dikunjungi Wisman dan Wisnus

No	Daerah	No	Daerah
1	Bali	6	Jawa Barat
2	DKI Jakarta	7	DI Yogyakarta
3	Kepulauan Riau	8	Nusa Tenggara Barat
4	Sumatera Utara	9	Sumatera Barat
5	Jawa Timur	10	Lombok (NTT)

Sumber : Statistic Indonesia, 2022

Data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa ke-10 daerah tersebut merupakan daerah utama yang banyak diminati oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara di Indonesia. Dari ke 10 daerah tersebut Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang mampu menarik minat wisatawan. Provinsi Jawa Barat juga telah ditetapkan sebagai tujuan wisata nasional oleh pemerintah pusat. Hal tersebut dikarenakan karena Provinsi Jawa Barat memiliki aksesibilitas yang

mudah, posisi yang strategis, dan merupakan overland-nya Jawa dan Bali. Selain itu, Jawa Barat juga memiliki banyak objek wisata, baik objek wisata alam, buatan, maupun minat khusus yang sudah terkenal baik di dalam maupun luar negeri.

Sektor pariwisata di Jawa Barat memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dan dapat menjadi salah satu sektor yang dapat diandalkan sebagai Pendapatan Asli Daerah. PAD Sektor Pariwisata di setiap Kabupaten/Kota di Jawa Barat berbeda, dari 27 Kabupaten/Kota terdapat 10 Kabupaten/Kota yang masuk sebagai daerah dengan PAD sektor pariwisata terbesar di Jawa Barat. Berikut tabel Kabupaten/Kota dengan PAD pariwisata terbesar di Jawa Barat tahun 2011-2019

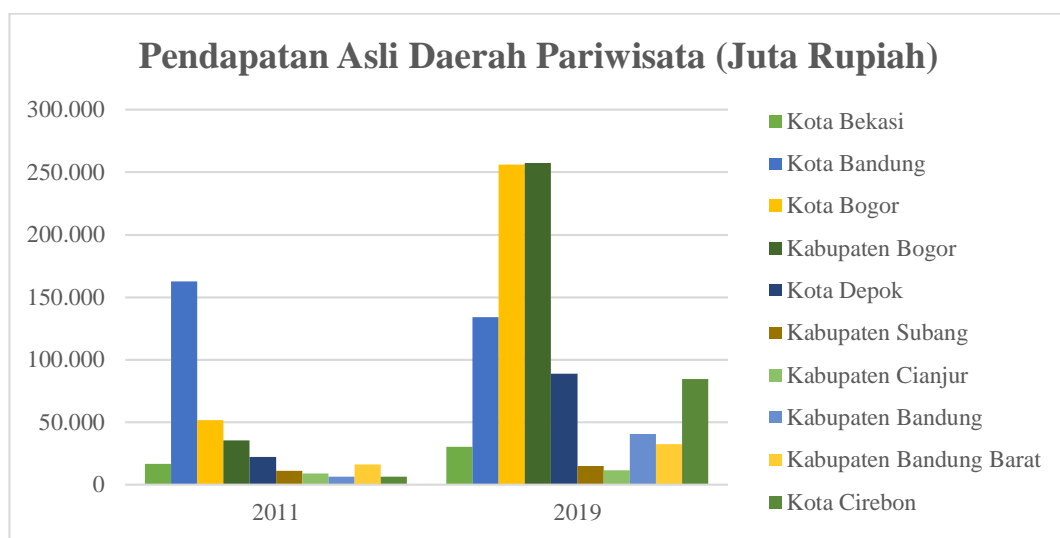
Tabel 1.2

Kabupaten/Kota Dengan PAD Pariwisata Terbesar di Jawa Barat Tahun 2011 – 2019

No	Kabupaten/Kota	PAD Sektor Pariwisata (Juta Rupiah)	
		2011	2019
1	Kabupaten Bogor	35.509	257.448
2	Kota Bogor	51.643	256.154
3	Kota Bandung	162.842	134.152
4	Kota Depok	21.949	88.714
5	Kota Cirebon	6.138	84.374
6	Kabupaten Bandung	6.519	40.683
7	Kabupaten Bandung Barat	16.151	32.398
8	Kota Bekasi	16.689	30.302
9	Kabupaten Subang	11.081	14.335
10	Kabupaten Cianjur	8.982	11.523
11	Kabupaten Kuningan	3.595	9.954
12	Kabupaten Ciamis	2.724	9.335
13	Kota Cimahi	2.467	7.087

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, 2022

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa dari beberapa wilayah di Jawa Barat terdapat 10 Kabupaten/Kota dengan PAD pariwisata terbesar di Jawa Barat yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Depok, Kota Cirebon, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur.



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, 2022

Gambar 1.2
Pendapatan Asli Daerah Pariwisata (Juta Rupiah)

Gambar 1.2 memperlihatkan variasi pendapatan asli daerah pariwisata di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Angka PAD pariwisata tertinggi pada tahun 2011 adalah Kota Bandung sebesar Rp. 162.482 juta dan mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar Rp. 134.152 juta. Selanjutnya ada PAD pariwisata Kota Bogor pada tahun 2011 sebesar Rp. 51.643 juta dan mengalami kenaikan di tahun 2019 sebesar Rp. 256.154 juta. Berikutnya ada Kabupaten Bogor di tahun 2011 sebesar Rp. 35.509 juta dan mengalami kenaikan di tahun 2019 sebesar Rp. 257.448 juta.

Kabupaten Bogor menjadi wilayah dengan tingkat PAD pariwisata terbesar di tahun 2019 karena Kabupaten Bogor berbatasan dengan Jakarta dan 10 daerah lainnya, sehingga potensi wisata puncak ini sangat besar, apalagi sudah menjadi destinasi favorit masyarakat Jabodetabek. Bervariasinya PAD pariwisata di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sangat erat kaitannya dengan kekuatan sosial di masing-masing Kabupaten/Kota tersebut, dan secara agregat berpengaruh pada angka pendapatan daerah.

Pada tahun 2020-2021 Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia berpengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah pengunjung wisatawan ke Jawa Barat karena berbagai kebijakan sektor kesehatan yang diterapkan pemerintah. Imbasnya, jumlah tenaga kerja sektor pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif Jawa Barat dirumahkan dan juga berimbas kepada PAD pariwisata. Sektor Pariwisata sendiri menyumbang PAD yang sangat besar bagi Jawa Barat. Namun selama Pandemi Covid-19 sektor pariwisata tidak mampu menyumbang banyak bagi pendapatan asli daerah.

Dalam konsep pariwisata, objek atau destinasi pariwisata merupakan unsur paling kuat dalam dunia kepariwisataan sebagai daya tarik dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Provinsi Jawa Barat memiliki banyak potensi di bidang pariwisata yang cukup besar untuk dikembangkan dengan banyaknya objek wisata yang dimiliki. Berikut data jumlah obyek wisata yang ada di 10 Kabupaten/Kota dengan PAD pariwisata terbesar di Jawa Barat tahun 2011-2020.

Tabel 1.3
Jumlah Objek Wisata Pada 10 Kabupaten/Kota Dengan PAD Pariwisata
Terbesar di Jawa Barat Tahun 2011 – 2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Wisata (Unit)	
	2011	2021
Kabupaten Bandung	55	98
Kabupaten Bogor	45	86
Kota Depok	16	84
Kota Bandung	11	61
Kabupaten Bandung Barat	38	59
Kabupaten Cianjur	17	50
Kabupaten Subang	38	35
Kota Bogor	16	30
Kota Bekasi	7	28
Kota Cirebon	10	17
Jumlah	246	520

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, 2022

Berdasarkan pada Tabel 1.3 diatas menunjukan bahwa Jawa Barat memiliki banyak potensi objek wisata yang dikembangkan. Jumlah objek wisata pada 10 Kabupaten/Kota dengan PAD pariwisata terbesar di Jawa Barat mengalami peningkatan jumlah obyek wisata setiap tahunnya. Hal ini bahwa pembangunan dalam bidang pariwisata di Jawa Barat sudah bagus dilihat dari objek yang tersedia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Jumlah objek wisata tahun 2011 masih terbilang sedikit hanya sebesar 246 unit, dan kemudian meningkat menjadi 520 unit di tahun 2020. Pada tahun 2020 jumlah obyek wisata yang tersedia di Jawa Barat menunjukan peningkat disetiap Kabupaten/Kota-nya, hal ini akan menyebabkan peningkatan pada PAD pariwisata melalui pajak atau retribusi yang didapat dari objek wisata.

Adanya beragam objek wisata yang ditawarkan di Provinsi Jawa Barat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Jawa Barat. Berikut ini tabel mengenai kunjungan wisatawan pada 10 Kabupaten/Kota dengan PAD pariwisata terbesar di Jawa Barat tahun 2011-2019.

Tabel 1.4
Jumlah Kunjungan Wisatawan Pada 10 Kabupaten/Kota Pengan PAD
Pariwisata Terbesar di Jawa Barat Tahun 2011 – 2019

Kabupaten/Kota	Kunjungan Wisatawan (Orang)	
	2011	2019
Kota Bandung	4.670.393	10.853.314
Kabupaten Bogor	4.645.223	9.484.957
Kota Bogor	3.254.169	9.160.884
Kabupaten Bandung Barat	990.792	5.517.072
Kabupaten Cianjur	936.334	4.900.805
Kabupaten Bandung	4.078.739	2.579.578
Kota Depok	1.878.360	2.068.314
Kota Cirebon	1.453.594	1.825.195
Kabupaten Subang	3.556.438	1.080.895
Kota Bekasi	772.323	977.434
Rata-rata	2.623.637	4.844.845

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, 2022

Tabel 1.4 diatas menunjukan bahwa perkembangan jumlah kunjungan wisatawan pada 10 Kabupaten/Kota dengan PAD pariwisata terbesar di Jawa Barat selalu mengalami fluktuasi. Di tahun 2011 rata-rata kunjungan wisatawan sebesar 2.623.637 orang, dan terjadi peningkatan sebesar 86% menjadi 4.844.845 orang pada tahun 2019. Pada tahun 2019 Kota Bandung menjadi salah satu daerah di Jawa

Barat yang jumlah kunjungan wisatawan tertinggi yaitu sebesar 10.853.314 orang, diposisi kedua dan ketiga yaitu Kabupaten Bogor sebesar 9.484.957 orang. Untuk Kabupaten/Kota dengan jumlah kunjungan terendah yaitu Kota Bekasi sebesar 977.434 orang di tahun 2019. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya daya tarik wisata pada daerah tersebut dan banyak fasilitas yang kurang mendukung, sedangkan di daerah lainnya adanya perbaikan fasilitas-fasilitas yang ada pada objek wisata mampu mempengaruhi daya tarik wisatawan.

Di tahun 2020-2021 jumlah wisatawan menurun dari pada tahun sebelumnya karena disebabkan Pandemi Covid-19 yang membuat wisatawan menunda dan membatalkan kunjungannya ke luar daerah. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat menyatakan kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara ke objek wisata yang ada di Provinsi Jawa Barat turun hingga 80% akibat dari Pandemi Covid-19. Penurunan tersebut terjadi merata di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Menurut (Purwanti dan Dewi, R. M; 2014) dalam jurnal ilmiah “pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap PAD Kabupaten Mojokerto” pengaruh jumlah kunjungan wisatawan sangat berpengaruh untuk pengembangan industri pariwisata dan PAD pariwisata sehingga wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara tertarik untuk berkunjung. Banyaknya wisatawan yang berkunjung menjadikan sektor pariwisata berpotensi meningkatkan PAD pariwisata. Akibatnya jumlah kunjungan wisatawan memberikan kontribusi yang positif terhadap PAD pariwisata. Faktor yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan sektor pariwisata yakni adalah lama menginap wisatawan asing maupun domestik di

Kabupaten/Kota Jawa Barat. Berikut ini tabel mengenai lama menginap wisatawan pada 10 Kabupaten/Kota dengan PAD pariwisata terbesar di Jawa Barat tahun 2011-2019.

Tabel 1.5
Lama Menginap Wisatawan Pada 10 Kabupaten/Kota Dengan PAD
Pariwisata Terbesar di Jawa Barat Tahun 2011 – 2019

Kabupaten/Kota	Lama Menginap Wisatawan (Hari)	
	2011	2019
Kota Bekasi	1,06	1,61
Kota Bandung	1,58	1,58
Kota Cirebon	1,76	1,57
Kabupaten Subang	1,52	1,41
Kota Bogor	1,56	1,40
Kabupaten Bandung	3,10	1,40
Kota Depok	2,25	1,35
Kabupaten Cianjur	1,87	1,31
Kabupaten Bandung Barat	2,32	1,24
Kabupaten Bogor	1,85	1,17
Rata-rata	1,89	1,40

Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2022

Pada Tabel 1.5 dapat dilihat bahwa rata-rata lama menginap wisatawan di 10 Kabupaten/Kota dengan PAD pariwisata terbesar di Jawa Barat mengalami penurunan yang awalnya di tahun 2011 sebesar 1,89 hari kemudian mengalami penurunan sebesar menjadi 1,40 hari di tahun 2019. Lama menginap wisatawan Kota Bekasi menjadi terbesar di tahun 2019 sebesar 1,61 hari. Diposisi kedua dan ketiga yaitu Kota Bandung sebesar 1,58 hari dan Kota Cirebon Sebesar 1,57 hari.

Untuk Kabupaten/Kota dengan lama menginap wisatawan terendah di tahun 2019 yaitu Kabupaten Bogor sebesar 1,17 hari.

Pada tahun 2020 hampir semua Kabupaten/Kota di Jawa Barat mengalami penurunan yang cukup signifikan, penurunan ini disebabkan karena akibat Pandemi Covid-19 yang mulai menyebar di tahun 2020, mengakibatkan semua aktivitas di batasi untuk menekan penyebaran virus yang menjadi dampak negatif untuk pariwisata. Lama menginap wisatawan di setiap Kabupaten/Kota di Jawa Barat berbeda-beda karena wisatawan yang berkunjung ke daerah wisata tidak semua menginap di daerah tersebut dan beberapa daerah objek wisata ada yang tidak bisa untuk ditinggali.

Lama menginap wisatawan merupakan jumlah malam atau hari yang dihabiskan oleh seorang wisatawan di luar tempat tinggalnya. Faktor lama menginap wisatawan merupakan salah satu faktor yang menentukan besar atau kecilnya pendapatan atau devisa yang diterima untuk daerah-daerah yang mengandalkan devisa dari industri pariwisata. Secara teoritis, semakin lama seorang wisatawan menginap disuatu daerah wisata, semakin banyak uang yang dibelanjakan di daerah tersebut.

Salah satu kebutuhan wisatawan selain atraksi wisata adalah kebutuhan untuk beristirahat. Bagi wisatawan yang datang dari luar daerah telah disediakan Hotel, Losmen dan Penginapan untuk pengunjung yang ingin menginap. Sehingga tingkat hunian hotel sangat berperan dalam peningkatan pendapatan di sektor pariwisata. Selain sebagai ajang bisnis, hotel dapat menarik wisatawan luar untuk berkunjung sehingga semakin banyak wisatawan berkunjung maka semakin banyak

pula pendapatan pariwisata yang diperoleh. Berikut adalah persentase tingkat hunian kamar pada 10 Kabupaten/Kota dengan PAD pariwisata terbesar di Jawa Barat tahun 2011-2019.

Tabel 1.6
Tingkat Hunian Hotel Pada 10 Kabupaten/Kota Dengan PAD Pariwisata
Terbesar di Jawa Barat Tahun 2011 – 2019

Kabupaten/Kota	Tingkat Hunian Hotel (Persen)	
	2011	2019
Kota Depok	53,56	62,42
Kota Bandung	54,25	59,05
Kota Bogor	51,11	58,88
Kota Bekasi	32,61	57,06
Kota Cirebon	59,97	55,47
Kabupaten Subang	47,66	39,10
Kabupaten Bandung	36,61	32,92
Kabupaten Bogor	42,38	30,38
Kabupaten Bandung Barat	29,61	27,41
Kabupaten Cianjur	37,12	25,61
Rata-rata	44,49	44,83

Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2022

Berdasarkan Tabel 1.6 dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat hunian hotel pada 10 Kabupaten/Kota dengan PAD pariwisata terbesar di Jawa Barat pada tahun 2011 sebesar 44,49 persen kemudian di tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 44,83 persen. Kota Depok menjadi Kota dengan tingkat hunian hotel tertinggi yaitu sebesar 62,42 persen, karena adanya pemadaman listrik di sejumlah wilayah Jabodetabek menyebabkan okupansi hotel meningkat hingga 40 %. *Public Relations The Margo Hotel (TMH)* Kartika Sekartadji mengatakan pengunjung

yang datang dan memesan kamar saat itu melonjak pesat. Untuk tingkat hunian hotel terendah di tahun 2019 yaitu Kabupaten Cianjur sebesar 25,61 persen. Pada tahun 2019 jumlah tingkat hunian hotel di Jawa Barat menurun dari tahun sebelumnya karena salah satu penyebabnya adalah banyaknya tempat kos, perumahan, termasuk apartemen yang dijadikan tempat penginapan.

Pada tahun 2020 semua Provinsi termasuk Jawa Barat mengalami penurunan tingkat hunian hotel akibat dari Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia di tahun 2020. Sejak pandemi Covid-19 melanda, okupansi hotel menurun anjlok karena orang-orang tak lagi bebas bepergian. Akibatnya, lebih dari 500 hotel di Jawa Barat tutup. Jumlah itu tepatnya 560 hotel dan 280 restoran per Juni tahun 2020. Informasi tersebut disampaikan Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat. Tingkat hunian hotel diperoleh dari banyaknya kamar yang dihuni dibagi kamar yang tersedia dikalikan 100% (Agin dan Christiono, 2012) dalam jurnalnya yang berjudul “pengaruh tingkat hunian hotel pada keputusan investasi proyek hotel santika surabaya”. Semakin tingginya tingkat hunian hotel maka semakin besar peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam usaha akomodasi (Nawangsih dan Bendesa, 2013). Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan pemerintah daerah melalui pajak hotel.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga merupakan salah satu komponen penting sebagai upaya untuk meningkatkan PAD di suatu daerah. PDRB juga dapat menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya pembangunan yang dimilikinya, oleh karena itu PDRB di setiap daerah bervariasi

sesuai dengan potensi yang dimiliki dan faktor produksi masing-masing daerah. Dengan PDRB yang meningkat maka akan menambah penerimaan daerah untuk membiayai program-program pembangunan yang selanjutnya akan mendorong produktivitasnya (Jaya dan Widanta, 2014). Berikut ini adalah tabel mengenai pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pada 10 Kabupaten/Kota dengan PAD pariwisata terbesar di Jawa Barat tahun 2011-2021.

Tabel 1.7
PDRB Atas Dasat Harga Konstan Pada 10 Kabupaten/Kota Dengan PAD
Pariwisata Terbesar di Jawa Barat Tahun 2011 – 2021

Kabupaten/Kota	PDRB (Miliar Rupiah)	
	2011	2021
Kota Bandung	110.234	194.414
Kabupaten Bogor	98.372	156.583
Kabupaten Bandung	51.250	81.947
Kota Bekasi	43.946	68.796
Kota Depok	28.431	48.947
Kota Bogor	19.944	32.372
Kabupaten Cianjur	20.660	31.898
Kabupaten Bandung Barat	20.419	30.702
Kabupaten Subang	20.466	28.023
Kota Cirebon	10.677	17.155
Jumlah	424.389	690.836

Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2022

Melihat Tabel diatas menggambarkan bahwa PDRB ADHK pada 10 Kabupaten/Kota dengan PAD pariwisata terbesar di Jawa Barat pada tahun 2011-2021 rata-rata mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2011 PDRB tercatat sebesar Rp. 424.389 miliar kemudian mengalami peningkatan 61% menjadi Rp. 690.836

miliar dan juga setiap tahunnya mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2021 Kota Bandung menjadi daerah dengan PDRB tertinggi sebesar Rp. 194.414 miliar. Posisi kedua yaitu Kabupaten Bogor sebesar 156.583 miliar dan posisi ketiga Kabupaten Bandung sebesar Rp. 81.947 miliar. Sedangkan PDRB terkecil yaitu Kota Cirebon sebesar Rp. 17.155 miliar. PDRB pada 10 Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -2% dari tahun 2019, penurunan tersebut akibat dari Pandemi Covid-19 yang membuat pemerintah membuat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan usaha artinya PDRB yang dilihat dengan menggunakan pendekatan produksi. Dalam hal ini, PDRB dihitung dari penjumlahan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh beberapa unit produksi di suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu (Bank Indonesia, 2014).

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan. (Boediono, 1999). Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memperlihatkan peningkatannya dari tahun ke tahun, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan untuk mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah menuju perekonomian yang berimbang dan dinamis. Pertumbuhan ekonomi juga diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang-bidang lainnya sekaligus sebagai kekuatan utama

pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi ketimpangan sosial ekonomi (BPS, 2003).

Dalam perspektif ekonomi, inflasi merupakan sebuah fenomena moneter dimana naik turunnya inflasi cenderung mengakibatkan terjadinya gejolak ekonomi. Pada prinsipnya tidak semua inflasi berdampak negatif pada perekonomian terutama jika terjadi inflasi ringan yaitu inflasi berada di bawah sepuluh persen. Inflasi ringan justru dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, hal ini karena inflasi mampu memberikan semangat kepada para pengusaha untuk lebih meningkatkan produksinya. Para pengusaha bergerak untuk memperluas produksinya karena dengan kenaikan harga yang terjadi para pengusaha mendapat lebih banyak keuntungan. Selain itu, peningkatan produksi memberikan dampak positif lain yaitu tersedianya lapangan kerja baru sedangkan inflasi akan berdampak negatif jika nilainya melebihi sepuluh persen. (Ni Nyoman, Ni Luh K, 2013). Berikut ini adalah tabel mengenai tingkat inflasi di 10 Kabupaten/Kota dengan PAD pariwisata terbesar di Jawa Barat tahun 2011-2019.

Tabel 1.8
Tingkat Inflasi Pada 10 Kabupaten/Kota Dengan PAD Pariwisata
Terbesar di Jawa Barat Tahun 2011 – 2019

Kabupaten/Kota	Tingkat Inflasi (Persen)	
	2011	2019
Kabupaten Bandung Barat	4,33	4,50
Kota Depok	2,95	3,29
Kabupaten Bandung	5,04	3,19
Kota Bogor	2,85	3,02
Kabupaten Subang	3,50	2,78
Kabupaten Bandung	5,04	2,78
Kabupaten Cianjur	2,99	2,33
Kabupaten Bogor	3,57	2,29
Kota Bekasi	3,45	2,00
Kota Cirebon	3,20	2,00
Jumlah	34,63	28,18

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan Publikasi BI, 2022

Dari Tabel 1.8 dapat dilihat bahwa tingkat inflasi pada 10 Kabupaten/Kota dengan PAD pariwisata terbesar di Jawa Barat mengalami fluktuasi. Tingkat inflasi di tahun 2011 sebesar 34,63 persen kemudian mengalami penurunan sebesar 19% menjadi 28,18 persen di tahun 2019. Inflasi terbesar di tahun 2019 yaitu Kabupaten Bandung Barat dengan tingkat inflasi sebesar 4,50 persen, diposisi kedua dan ketiga yaitu Kota Depok sebesar 3,29 persen dan Kabupaten Bandung sebesar 3,19 persen. Untuk tingkat inflasi terendah yaitu Kabupaten Cirebon sebesar 2,00 persen. Pada tahun 2020 seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat tingkat inflasinya lebih rendah dari tahun sebelumnya, hal ini karena Pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap permintaan atau daya beli masyarakat dan pandemi menyebabkan aktivitas ekonomi yang turun, sehingga berdampak pada penurunan tingkat inflasi. Selaras

dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah Jawa Barat telah berupaya mendongkrak perekonomian Jawa Barat melalui pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di triwulan terakhir 2020. Hasilnya cukup menggembirakan, inflasi Provinsi Jawa Barat bergairah di angka positif sejak September 2020, setelah tiga bulan berturut-turut (Juni s.d. Agustus 2020) inflasi Provinsi Jawa Barat berada di angka negatif (*deflasi*). Puncaknya, tekanan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember 2020. Peningkatan tekanan inflasi pada Desember 2020 didorong oleh meningkatnya harga pangan dan bahan pangan.

Bertambahnya tingkat inflasi dapat menurunkan daya beli atau konsumsi masyarakat karena turunnya pendapatan riil masyarakat. Sebaliknya, jika tingkat inflasi menurun, maka pendapatan riil masyarakat akan meningkat. Maka inflasi yang rendah di pemerintah daerah sangat diharapkan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi, oleh karena itu pertumbuhan inflasi yang tinggi sangat berpengaruh pada perolehan pendapatan asli daerah berupa sumbangan pajak, retribusi di masyarakat.

Tabel 1.9
Sektor - sektor Yang Terkena Dampak Pandemi Covid-19 di Jawa Barat
Tahun 2020 – 2021

Sektor	Tahun	
	2020	2021
Pendapatan Asli daerah Sektor Pariwisata	1.366.764	3.005.956
Jumlah Kunjungan Wisatawan	38.483.062	47.353.059
Lama Menginap Wisatawan	1,56	1,57
Tingkat Hunian Hotel	38,80	44,68
Tingkat Inflasi	2,18	1,77

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, 2022

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat terdampak akibat adanya Pandemi Covid-19. Sektor pariwisata menyumbang PAD sangat besar, tapi di tahun 2020 PAD pariwisata sebesar Rp. 1.366.764 juta kemudian itu menurun 58% ketimbang di tahun 2019 yang sebesar Rp. 3.281.099 juta. Namun di tahun 2021 PAD pariwisata mulai menunjukkan kenaikan sebesar Rp. 3.005.956 juta karena beberapa obyek wisata sudah mulai pada dibuka kembali. Menurunnya jumlah setoran PAD dari pariwisata sejurus dengan merosotnya kunjungan wisatawan menjadi 38.483.062 orang kemudian di tahun 2021 mulai mengalami kenaikan sebesar 47.353.059 orang karena di tahun 2021 para wisatawan sudah mulai berkunjung lagi ke tempat wisata. Lama menginap wisatawan juga terkena dampak Pandemi Covid-19 terjadi penurunan sebesar 1,56 hari di tahun 2020 dan di tahun 2021 mengalami kenaikan 1,57 hari pada tahun 2021. Tingkat hunian hotel di tahun 2020 sebesar 38,80 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya dan kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 44,68 persen. Dan tingkat inflasi di tahun 2019 sebesar 3,21 persen kemudian menurun sebesar 2,18 persen dan di tahun 2021 juga masih mengalami penurunan sebesar 1,71 persen.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor prioritas utama dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah serta dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing, dengan demikian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan daerah. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Rahmawati (2018), Abdurrahman Habibie Alghifari (2018), Irma Mudzhalifah (2018), Rahmah Muin (2016), dan Sagung Istri Santhi Permata Sari (2018). Hasil menunjukkan bahwa Jumlah Objek Wisata, Jumlah Kunjungan

Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel, dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan Lama Menginap Wisatawan dan Tingkat Inflasi berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap PAD pariwisata.

Melihat perkembangan yang terjadi pada sektor pariwisata di Provinsi Jawa Barat yang mampu memberi sumbangan terhadap daerah tersebut, maka penelitian tertarik untuk menganalisis **“Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata : Studi Kasus Pada 10 Kabupaten/Kota Dengan PAD Pariwisata Terbesar Di Jawa Barat”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, ini beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan Jumlah Objek Wisata, Jumlah Kunjungan Wisatawan, Lama Menginap Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel, PDRB, Tingkat Inflasi dan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata pada 10 Kabupaten/Kota Dengan PAD Pariwisata Terbesar di Jawa Barat ?
2. Bagaimana pengaruh Jumlah Objek Wisata, Jumlah Kunjungan Wisatawan, Lama Menginap Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel, PDRB, Tingkat Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata pada 10 Kabupaten/Kota Dengan PAD Pariwisata Terbesar di Jawa Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan Jumlah Objek Wisata, Jumlah Kunjungan Wisatawan, Lama Menginap Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel, PDRB, Tingkat Inflasi dan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata pada 10 Kabupaten/Kota Dengan PAD Pariwisata Terbesar di Jawa Barat ?
2. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Objek Wisata, Jumlah Kunjungan Wisatawan, Lama Menginap Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel, PDRB, Tingkat Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata pada 10 Kabupaten/Kota Dengan PAD Pariwisata Terbesar di Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan praktis dan kegunaan akademis.

1.4.1 Kegunaan Akademis

Diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Khususnya, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada 10 Kabupaten/Kota dengan PAD pariwisata terbesar di Jawa Barat.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan, pemahaman serta wawasan yang lebih mendalam tentang laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Bagi pemerintah, diharapkan menentukan kebijakan yang tepat guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata.
3. Bagi masyarakat, diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi masukan untuk melestarikan objek wisata.
4. Bagi Akademisi, diharapkan dapat memberikan informasi dalam penelitian selanjutnya mengenai analisi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada 10 Kabupaten/Kota Dengan PAD Pariwisata Terbesar di Provinsi Jawa Barat.